

PERILAKU RASIONAL POLITIK BIROKRASI DALAM PEMILU 2019 DI KABUPATEN BOLEMO

Ramli Mahmud¹, Asmun Wantu², Rasid Yunus³, Yuli Adhani⁴

Universitas Negeri Gorontalo

ramlimahmud33@ung.ac.id¹, asmunwantu@ung.ac.id²,

rasidyunus@ung.ac.id³, yuliadhani@ung.ac.id⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta mengidentifikasi faktor yang menghambat perilaku rasional politik birokrasi pada Pemilu 2019 di Kabupaten Boalemo. Untuk menjawab tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ASN yang berada di jajaran struktural dan fungsional guru cenderung berperilaku tidak rasional dalam Pemilu. Sementara itu, ASN yang berada di jajaran fungsional Kesehatan cenderung rasional dalam menentukan pilihan politik. Terdapat tiga faktor yang menghambat preferensi politik ASN dalam perilaku rasional politik, diantaranya adalah faktor kekeluargaan dan kekerabatan atau ikatan persaudaraan, keberadaan kepala daerah sebagai petahana dan yang terakhir adalah faktor motif jabatan karir. Hal ini yang menyebabkan ASN cenderung tidak netral dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Boalemo. Kenetralan ASN dapat tercapai jika berperilaku rasional dalam menentukan pilihan politik yang terdiri atas pertimbangan logis dan konsistensi berdasarkan pada visi, misi dan program kerja baik partai politik maupun calon.

Kata Kunci: *Perilaku Rasional Politik, Birokrasi, Pemilu*

ABSTRACT

This study aims to analyze and identify factors that hinder the rational behavior of bureaucratic politics in the 2019 elections in Boalemo County. To answer this goal, this study uses qualitative methods with a phenomenological approach. The results showed that ASNs in the structural and functional ranks of teachers tend to behave irrationally in elections. Meanwhile, ASNs who are in the functional ranks of Health tend to be rational in making political choices. There are three factors that hinder ASN's political preferences in politically rational behavior, including familial and kinship factors or fraternal ties, the existence of regional heads as incumbents and the last is the motive factor for career offices. This is why asn tends not to be neutral in the 2019 elections in Boalemo County. Asn neutrality can be achieved if it behaves rationally in determining political choices consisting of logical considerations and consistency based on the vision, mission and work programs of both political parties and candidates.

Keywords: *Political Rational Behavior, Bureaucracy, Elections*

PENDAHULUAN

Sebagai organisasi publik, tentunya salah satu kajian yang tidak dapat dipisahkan adalah menyangkut dengan perilaku organisasi maupun individu yang berada dalam

birokrasi. Toha & Miftah, 2019; Robbins & Judge, 2015; Gitosudarmo & Sudita, 2016; Jones, Bradbury & Bputtiler, 2016; Fahmi, 2018 Memiliki kesimpulan yang sama bahwa organisasi tidak bisa terlepas dari perilaku politik individu maupun kelompok dalam struktur organisasi. Antara pengaruh dan dipengaruhi merupakan sifat dasar yang merupakan bagian dari hasil interaksi antara atasan dengan bawahan maupun antara sesama bawahan.

Secara eksplisit, Toha Miftah (2002) seperti dikutip dalam Mahmud (2022) mengemukakan bahwa perilaku birokrasi merupakan perpaduan antara karakteristik individu dan karakteristik birokrasi. Karakteristik Individu yang dimaksudkan antara lain kemampuan, kebutuhan, kepercayaan, pengalaman dan pengharapan. Sementara itu karakteristik birokrasi terdiri atas hirarki, tugas, wewenang tanggung jawab, sistem reward dan sistem control. Berdasarkan pada argumentasi teori tersebut di atas dapat digaris bawahi perilaku organisasi dalam hal ini birokrasi tidak bisa terlepas dari perilaku politik anggotanya dalam organisasi birokrasi itu sendiri. Dalam konteks Pemilu, perilaku politik birokrasi dapat dipetakan melalui tiga pendekatan di antaranya pendekatan sosiologis, psikologis dan rasional. Antunes & Rui (2010) dalam Mahmud (2022) mengemukakan bahwa terdapat tiga pendekatan dalam mengidentifikasi perilaku memilih, di antaranya:

- Pendekatan sosiologis, memiliki indikator yang dapat dilihat melalui kecenderungan subjektifitas pemilih berdasarkan prasyarat status sosial, ekonomi, ras, agama, etnis, jender, ketokohan, organisasi masyarakat dan daerah tempat tinggal.
- Pendekatan psikologis, yang ditandai dengan kecenderungan subjektifitas pemilih terhadap identifikasi partai, kandidat dan isu.
- Perilaku Rasional, indikator yang dapat dilihat dari perilaku pemilih yang rasional antara lain diantaranya pertimbangan logis yang sesuai dengan kebutuhan pemilih, konsistensi terhadap pilihan atas partai politik atau calon berdasarkan pada refleksi masa lalu antara pro dan kontra dan bahkan inkonsistensi

Atas ketiga pendekatan tersebut, Ladini (2019:107), Mahmud (2020:561) mendefinisikan perilaku rasional merupakan perilaku seseorang dalam memutuskan pilihan politiknya berdasarkan pada kalkulasi untung rugi yang berlandaskan pada visi dan misi serta tawaran program yang menguntungkan kedua belah pihak. Artinya, pendekatan *rational choice* sangat beririsan dengan tipe ideal rasional birokrasi yang menuntun birokrasi keluar dari politik praktis agar terciptanya independensi dan netralitas birokrasi dalam Pemilu. artinya realisasi netralitas birokrasi dapat tercapai jika ASN memiliki sandaran atau landasan pilihan politik pada setiap Pemilu dengan mengedepankan pilihan-pilihan politik yang rasional. Terdapat banyak studi tentang netralitas Birokrasi dalam Pemilu namun memiliki kesimpulan yang sama bahwa birokrasi di Indonesia hingga saat ini sulit untuk netral.

Merujuk pada temuan kontekstual tersebut, pendefinisian terhadap perilaku birokrasi layaknya tidak hanya dilihat dari segi perilaku atau sikap ketidaknetralan dalam Pemilu, akan tetapi secara substansial menggunakan paradigma perilaku politik untuk mengukur atau menelaah dan memetakan kecenderungan sikap politiknya disaat Pemilu. Dengan paradigma ini, dipandang dapat merekonstruksi pola perilaku birokrasi dalam Pemilu. Netral atau tidak netralnya birokrasi dalam Pemilu merupakan representasi dari pola perilaku yang dibangun berdasarkan orientasi politiknya. Oleh sebab itu, pendekatan perilaku politik merupakan hal urgen dalam melihat penyebab ketidaknetralan birokrasi dalam Pemilu. Hampir dapat dipastikan bahwa, secara keseluruhan partai pemenang Pemilu baik tingkat kabupaten. Kota maupun provinsi adalah partainya kepala daerah sebagai petahana. Khusus untuk kabupaten Boalemo sejak Pemilu 2004 hingga 2019 semuanya dimenangkan oleh partai kepala daerah. Penguasaan akses atas sumber daya birokrasi oleh kepala daerah menentukan fluktuasi kemenangan partai di setiap perhelatan Pemilu.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis dan bertempat di kabupaten Boalemo. Moleong, (2014) dan (Harrison Lisa, (2016) mengemukakan dalam penelitian kualitatif, peneliti sebagai instrumen kunci yang tidak bisa diwakili oleh orang lain. Artinya peneliti harus memahami arti peristiwa dalam kaitannya terhadap orang-orang dalam situasi tertentu yang berdasarkan pada pengalaman yang muncul pada kesadaran objek yang diteliti, Ulasan dalam menentukan pendekatan fenomenologi dalam menelaah perilaku birokrasi dalam pemilu 2019 di Kabupaten Boalemo merupakan bagian dari setting alamiah, dimana lingkungan dan peneliti merupakan bagian dari konteks lingkungan yang tidak bisa dipisahkan. Dalam hal ini peneliti tetap menjaga eksistensi berdasarkan pendekatan penelitian yang diangkat dan sesuai dengan apa dialami oleh subjek, artinya tujuan fenomenologi adalah kembali pada realitasnya sendiri.

PERILAKU RASIONAL POLITIK BIROKRASI DALAM PEMILU

Salah satu permasalahan penting penyelenggaraan reformasi organisasi sektor publik bagi birokrasi Indonesia adalah netralitas politik dalam Pemilu. Birokrasi memiliki sumber daya yang tidak terhingga, tidaklah mengherankan jika posisi mereka selalu dijadikan sebagai mesin politik dalam memenangkan partai politik beserta calonnya dalam Pemilu. Sebagai masyarakat sipil, hak politik birokrasi dijamin dalam negara demokrasi, disisi lain, hak politiknya dibatasi dalam setiap pelaksanaan Pemilu. Dilema berkepanjangan birokrasi yang selalu dihantui oleh kepentingan praktis elit politik menjadi boomerang dan ancaman atas eksistensinya. Data survei KASN 2021 tentang netralitas birokrasi mengemukakan bahwa 51,16 % Aspirasi ASN menginginkan agar hak politik dicabut sebagai pemilih. Ini artinya, kekhawatiran dan

ketidaknyamanan ASN dalam setiap Pemilu berpengaruh terhadap eksistensinya sebagai warga sipil sekaligus sebagai abdi negara.

Ketidaknetralan ASN dalam Pemilu merupakan bagian dari patologi birokrasi yang harus dicarikan solusi, dengan demikian perspektif perilaku politik menjadi salah satu acuan untuk menelaah masalah dimaksud. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, ASN yang berada dalam jajaran struktural dan fungsional khususnya guru bermasalah dalam segi netralitasnya. Keberpihakan terhadap partai dan calon tertentu membuat mereka tidak rasional dalam menentukan pilihan politik. sementara itu, birokrasi atau ASN yang berada dalam jajaran fungsional Kesehatan cenderung rasional dalam menentukan pilihan politik.

Antunes & Rui, (2010) mengemukakan bahwa pemilih rasional berpedoman pada aspek logis, artinya sebelum menentukan pilihan politik, evaluasi atas berbagai alternatif termasuk isu dan kandidat menjadi prioritas utama dalam menentukan preferensi politik mereka. Sementara selain logis, pemilih akan konsisten atas pilihannya, artinya ketika alternatifnya sama dengan kondisi sebelumnya, pemilih akan mengikuti pilihan politik pada peristiwa yang dialami oleh pemilih pada kondisi yang sebelumnya. Sebagai ASN sudah tentu memiliki preferensi yang berbeda, ASN dalam preferensi politik pada pendekatan perilaku ini akan lebih mengutamakan nilai dan sikap berdasarkan pada apa yang menjadi tugas pokok dan tanggung jawab dalam melayani masyarakat.

Temuan tersebut berbeda dengan temuan lainnya yang berkesimpulan bahwa tenaga Kesehatan selalu menjadi prioritas dalam kemenangan Pemilu maupun Pilkada. Akan tetapi Kabupaten Boalemo mengalami fenomena yang berbeda dengan daerah lain. Dimana dalam menentukan pilihan politik, tenaga fungsional dalam hal ini tenaga kesehatan mengedepankan aspek rasionalitas dalam memberikan dukungan dan pilihan politik. Urgensitas yang mendasari pilihan dan dukungan politik terhadap calon dan partai politik berdasarkan pada aspek visi-misi atau program calon yang berhubungan langsung dengan wilayah kerja tenaga kesehatan. Selama visi-misi dan program kerja yang mengarah pada isu kesehatan di Kabupaten Boalemo akan menjadi dasar utama bagi tenaga kesehatan untuk merepresentasikan dukungan politik.

Logis dan konsistensi yang dimaksud adalah preferensi politik ASN berdasarkan pada pertimbangan visi-misi dan program kerja yang berhubungan dengan kebutuhan dan isu Kesehatan di Kabupaten Boalemo. Perilaku politik yang rasional tidak menutup diri atas semua akses informasi, berbeda dengan perilaku sosiologis dan psikologis yang hanya menerima informasi dari satu sumber baik yang berasal dari partai politik maupun calon yang mereka simpati. Pola pendekatan perilaku sosiologis dan psikologis cenderung menutup diri dengan berbagai informasi mengenai Pemilu. ASN yang berperilaku rasional akan mempertimbangkan informasi terutama melalui media sosial

tentang harapan terhadap isu maupun program yang ditawarkan oleh calon kandidat maupun partai politik.

Ikhtiar Toha & Miftah, (2002) tentang karakteristik birokrasi dari aspek tugas dan tanggung jawab sebagai ASN ditunjukkan lewat sikap dan pilihan politik rasional tenaga fungsional kesehatan di Kabupaten Boalemo menjelang Pemilu 2019. Disisi lain aspek karakteristik birokrasi yang melingkupi tugas dan tanggung jawab merupakan bagian dari sikap rasionalitas ASN dalam menentukan pilihan politik. sebagai tenaga kesehatan yang berada di jajaran fungsional lebih mengedepankan profesionalitas sebagai abdi Negara yang memegang penuh sumpah jabatan dan profesi bila dibandingkan dengan ASN yang berada di jajaran struktural dan fungsional guru. Dengan demikian, ikhtiar David & Beetham, Toha Miftah (dalam Mahmud 2022) tentang independensi dan netralitas birokrasi menuai data konkrit bahwa, ketidaknetralan birokrasi pada setiap Pemilu merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari urgensi perilaku ASN dalam Pemilu. artinya kenetralan birokrasi akan tercapai jika ASN mengedepankan perilaku politik rasional dalam setiap Pemilu.

FAKTOR YANG MENGHAMBAT PERILAKU RASIONAL POLITIK BIROKRASI DALAM PEMILU

Hasil temuan Survei KASN 2021 tentang netralitas birokrasi menunjukkan bahwa ketidaknetralannya birokrasi disebabkan oleh Posisi Kepala Daerah sebagai PPK mencapai 62,7%, ikatan persaudaraan 59,76%, serta motif karir 49,72%. Sementara faktor yang mempengaruhi terdiri atas keberadaan tim sukses 32%, atasan 28% dan pasangan calon 24%. Temuan KASN tersebut juga sesuai dengan beberapa temuan antara lain (Adian & Firans, 2011; Sarnawa Bagus, 2018; Rakhmawanto, 2017; Wahyudi, 2018; Mudiarta, 2018; Diana, 2020). Memberikan kesimpulan bahwa birokrasi dalam arena Pemilu maupun Pilkada mengalami kesulitan untuk netral, politisasi dan mobilisasi sumber daya birokrasi adalah fakta kontekstual yang sulit untuk dihindari. Hal sama menjadi temuan Aspinall & Berenschot, 2019) bahwa politisasi birokrasi menggunakan fasilitas negara, mobilisasi ASN, Kompensasi jabatan, mempolitisir rekrutmen ASN baru, komersialisasi jabatan hingga pada pencopotan jabatan karir menjadi faktor yang menghambat netralitas birokrasi dan menyebabkan kecenderungan birokrasi tidak netral dalam Pemilu.

Faktor Keluarga dan Kerabat Dekat

Dalam kondisi masyarakat tertentu, ASN dianggap sebagai orang yang mempunyai strata lebih tinggi bila dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya. Hal ini yang kemudian membuat masyarakat dalam hal ini keluarga maupun kerabat dekat ASN merepresentasikan kepentingan politiknya lewat kelompok ASN. Riset Aspinall & Berenschot, (2019) oleh Harjanto & Niko, (2011) menegaskan bahwa dalam masyarakat patrimonial seperti Indonesia, mereka dapat menyediakan dukungan

elektoral bagi para politisi dengan imbalan berupa bantuan atau manfaat secara materil. Artinya kerabat dekat atau keluarga merupakan alat yang sangat tepat untuk membentuk kekuasaan yang kuat. Langkah ini diambil untuk memastikan loyalitas terhadap pimpinan dengan menunjukkan kekuatan dukungannya melalui keluarga dan kerabat dekat disaat Pemilu. temuan yang sama juga bisa dilihat pada hasil riset KASN 2021 tentang netralitas birokrasi, dimana sekitar 59,76% perilaku politik ASN lebih dipengaruhi oleh faktor kedekatan persaudaraan atau ikatan keluarga.

Kondisi demikian juga terjadi pada Pemilu 2019 di Kabupaten Boalemo, salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku rasional politik ASN adalah faktor ikatan kekeluargaan dan persaudaraan atau kekerabatan. Dengan memanfaatkan ruang keluarga atau kerabat dekat ASN pada setiap Pemilu signifikan dalam kemenangan partai politik, khususnya dalam pemilihan anggota DPRD Kabupaten Boalemo. Jejaring seperti ini memiliki ikatan emosional yang sangat dekat dengan pemilih dan bisa dimanfaatkan sebagai salah satu strategi kemenangan partai. Fenomena ini dimanfaatkan oleh ASN sebagai bagian dari gerakan mobilisasi politik yang tentunya memiliki harapan dalam menunjukan kepada atasan bahwa yang bersangkutan patut diperhitungkan pada basis masa tertentu dalam merepresentasikan harapan atasan dalam hal ini kepala daerah.

Faktor Kepala Daerah Sebagai Petahana

Temuan Aspinall & Berenschot, (2019) mengemukakan bahwa terdapat tiga alasan mendasar yang membuat partai kepala daerah memiliki keuntungan atau menang dalam setiap Pemilu. Diantaranya a) dukungan aparat birokrasi. ASN mendukung partainya kepala daerah demi mengamankan pekerjaan mereka. b) Kepala Daerah memiliki kontrol atas sumber daya negara, langkah kreatif untuk mengarahkan anggaran serta manfaat lainnya kepada para pendukung melalui bantuan sosial hingga proyek infrastruktur. c) menggunakan program pemerintah untuk mempertahankan visibilitas publik melalui iklan dan spanduk tentang keberhasilan program pemerintah daerah. Temuan tersebut sinkron dengan apa yang menjadi temuan KASN 2021, terdapat 62,7% ASN berperilaku tidak netral atau cenderung tidak rasional dikarenakan pertimbangan kepala daerah. Hasil penelitian menunjukkan terdapat dua indikator dalam hal ini, diantaranya adalah:

Pertama. Kepala daerah memiliki kontrol penuh terhadap sistem dan aparatur birokrasi di daerah. Keberadaan ASN beserta keluarganya dikontrol suaranya pada setiap TPS melalui struktur OPD. Untuk merealisasikan hal tersebut. lahirlah apa yang dikenal dengan (TKPP) atau Tim Koordinasi Kelancaran Pemilu yang melibatkan seluruh OPD dan ASN di Kabupaten Boalemo. Kehadiran tim tersebut dianggap efektif dalam mengontrol ASN pada setiap hingga menghasilkan kemenangan pertama kali PDIP di kabupaten Boalemo pada pemilihan anggota DPRD Kabupaten Boalemo.

Kedua, Peran sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Sebagai kepala daerah memiliki kewenangan penuh terhadap pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat maupun tenaga administrasi dalam wilayah kerja administrasi pemerintahan daerah lingkup Kabupaten. Kewenangan penuh sebagai pejabat PPK, kepala daerah memainkan peran dalam mempengaruhi perilaku birokrasi pada Pemilu. Kewenangan dalam mengontrol sumber daya organisasi birokrasi daerah yang diperkuat lewat keberadaannya sebagai PPK membuat birokrasi atau ASN mudah untuk dikontrol dan diarahkan untuk kemenangan PDIP. Tentunya dalam fenomena ini, penekanan secara psikis terhadap ASN dalam menentukan pilihan politik sangat mempengaruhi perilaku politik ASN dalam menentukan pilihan politik.

Faktor Jabatan Karir

Untuk mencari posisi tertentu dalam jabatan birokrasi, ASN menunjukkan loyalitas dan ketaatannya terhadap himbauan kepala daerah dengan cara menunjukkan dukungan politik terhadap calon dan partai yang diinginkan oleh Kepala daerah. Promosi dan penunjukan jabatan karir sebahagian besar posisi yang diisi belum memenuhi kualifikasi kepangkatan. Artinya, promosi dan penunjukan jabatan karir bukan berdasarkan pada aturan yang berlaku, namun lebih pada penilaian subjektif kepala daerah disaat tahapan pelaksanaan Pemilu. Layaknnya, promosi jabatan dilakukakuan apabila seseorang pegawai dipindahkan dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lain yang tanggung jawabnya lebih besar, tingkatannya dalam hirarki jabatannya lebih tinggi dan penghasilannya lebih besar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir sebagian besar promosi dan penunjukan jabatan karir di kabupaten Boalemo baik sebelum dan sesudah Pemilu 2019 cenderung belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penunjukan dan promosi jabatan karir lebih pada prioritas subjektif kepala daerah.

Temuan tersebut sama halnya dengan apa yang dikemukakan oleh (Aspinall & Berenschot, (2019) bahwa keterlibatan ASN dalam Pemilu semata-mata memperjuangkan Kepentingan pejabat politik dan pejabat birokrasi. Politisasi birokrasi tersebut telah memetakan posisi pejabat senior sekitar 80 % penunjukan berlandaskan pada dukungan terhadap calon dan partai politik selama tahapan penyelenggaraan Pemilu. Hal demikian juga ditemukan dalam riset KASN tentang netralitas birokrasi menunjukkan sekitar 49,7% motif dukungan ASN karena preferensi karir sebagai ASN. Kondisi seperti ini yang menghambat perilaku rasional politik birokrasi dalam Pemilu 2019 di kabupaten Boalemo. Atas pertimbangan karir sebagai birokrasi di daerah, cenderung berpihak karena pertimbangan karir.

SIMPULAN

Kecenderungan tidak netralnya birokrasi pada Pemilu 2019 di Kabupaten Boalemo dikarenakan preferensi politik yang tidak rasional dalam menentukan pilihan politik. ASN yang berada dalam fungsional khususnya tenaga kesehatan cenderung

rasional, berdasarkan pada pertimbangan yang logis dan konsisten terhadap pilihan politik, tenaga Kesehatan lebih memprioritaskan visi misi dan program kerja yang berhubungan dengan kebutuhan atau isu Kesehatan yang ditawarkan oleh partai maupun calon kandidat. selain itu, terdapat tiga faktor yang menghambat perilaku rasional politik birokrasi, diantaranya adalah faktor pertimbangan keluarga, kekerabatan atau ikatan persaudaraan, posisi kepala daerah sebagai petahana yang sudah tentu menguasai akses sumber daya birokrasi di daerah serta faktor atau motif jabatan karir yang membuat ASN cenderung tidak rasional dalam menentukan pilihan politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adian, & Firans. (2011). Evaluasi Reformasi Birokrasi : Masalah Politisasi Birokrasi Dalam Politik Indonesia. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS*, VOL. 5, No.(2).
- Aspinall, E., & Berenschot., W. (2019). *Democracy For Sale*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- David, & Beetham. (1990). *Birokrasi*. Jakarta: : Bumi Aksara.
- Diana, B. A. (2020). Pengaruh Politik Dalam Birokrasi Pemerintahan. *Jurnal Birokrasi & Pemerintahan Daerah., Volume 2. No. (1)* .
- Fahmi. (2018). *Perilaku Organisasi Teori, Aplikasi, dan Kasus*. Bandung: Alfabeta.
- Gitosudarmo, & Sudita. (2016). *Perilaku Keorganisasian*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Harjanto, & Niko. (2011). Politik Kekerabatan dan Institutionalisation Partai Politik di Indonesia. *Analisis CSIS*.
- Harrison Lisa. (2016). *Metodologi Penelitian Politik*. Edisi 1 Cetakan 3. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Jones, Bradbury, & Bputtiler. (2016). *Pengantar Teori-Teori Sosial*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- KASN. (2021). *Hasil Suevei KASN*. Diambil kembali dari Politisasi Birokrasi terus Mengancam, Sebagian ASN Minta Hak Politik di Cabut: <https://kasn.go.id/id/publikasi/hasil-survei-kasn-politisasi-birokrasi-terus-mengancam-sebagian-asn-minta-hak-politik-dicabut>.
- Ladini, Y. (2019). Perilaku Memilih Pemegang Kartu Tani pada Pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2018 Kabupaten Semarang. *Journal of Governance Dan Political Social*, Vol. 7 Nomor 7
- Mahmud, R., 2022. Perilaku Birokrasi Pada Pemilu 2019 Dalam Perspektif Administrasi Publik di Kabupaten Boalemo. Gorontalo, Pascasarjana UNG
- Mahmud, R. (2020). *Strengthening Local Democracy (Orientation Study of Political Culture of Coastal Communities in Dulupi District, Boalemo Regency)*.

- Moleong, L. (2014). Penelitian kualitatif. Bandung. Bandung: Edisi Revisi. PT Remaja Rosdakarya.
- Mudiarta, U. (2018). Politisasi Pelayanan Publik Perspektif Komparatif Beberapa Negara (Mencari Cara Mengontrol Birokrasi. *Jurnal Politik & Pemerintahan*, Vol.2, No.2.
- Rakhmawanto. (2017). Perspektif Politisasi Birokrasi Dan Peran Pejabat Pembina Kepegawaian Dalam Birokrasi Pemerintah. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, Vol. III Nomor (1).
- Robbins, & Judge. (2015). Perilaku organisasi, organization behavior. Salemba Empat.
- Sarnawa Bagus. (2018). Pergeseran Aturan Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Media Hukum*, Vol. 25 No(.2).
- Toha, & Miftah. (2019). Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya. Jakarta: ; Raja Gtafindo Persada.
- Wahyudi, L. (2018). Politisasi Birokrasi Lokal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung. *Jurnal Paradigma*, Vol. 7 No. 3.